



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 26  
TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH  
KABUPATEN PEMALANG DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN  
2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021 sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2016- 2021;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2019, Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Pemalang masih terdapat beberapa indikator yang belum spesifik dan belum mengikuti kaidah yang ditentukan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021 perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13); (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);

14. Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 26 Nomor 26) sebagaimana telah dibuat beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 26 yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 12);
  - b. Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 58),
- diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 17 Juni 2020

BUPATI PEMALANG,

cap  
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 17 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,

cap  
ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG,



SRI SUBYAKTO, SH., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI PEMALANG  
 NOMOR 30 TAHUN 2020  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016-2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 – 2021**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB			
1	2	3	4	5	6	7	8			
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai wujud pelayanan publik yang prima dan perbaikan citra publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Pemda	Nilai	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi yang diperoleh	BAPPEDA, Setda, Inspektoral			
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah				Hasil Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Nilai	Nilai Hasil Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah
				Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik				Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah Pelayanan Publik	Nilai	
								Jumlah Nilai SKM seluruh Unit Pelayanan Publik Total Unit Pelayanan Publik		

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar serta pendidikan non formal	Rata-rata lama sekolah Harapan lama sekolah	Tahun Tahun	Nilai Nilai Indeks Pembangunan Manusia yang diperoleh	Dindikbud Dindikbud
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Gender	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Dinkes (Sumber data: BPS)
			Meningkatnya kualitas hidup, kemampuan dan partisipasi perempuan dalam ranah publik	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	Ket : $X_{ade(1)} = X_{ade}$ untuk harapan hidup $X_{ade(2)} = X_{ade}$ untuk pendidikan $I_{inc-dis} = Indeks$ distribusi pendapatan $IPJ = 1/3 (X_{ade(1)} + X_{ade(2)} + I_{inc-dis})$	Dinsos KBPP (Sumber data: BPS)
			Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	Ket : $I_{par} = Indeks$ Keterwakilan di Parlemen $I_{dm} = Indeks$ Pengambilan keputusan $I_{inc-dis} = Indeks$ distribusi Pendapatan $IDJ = 1/3 (I_{par} + I_{dm} + I_{inc-dis})$	Dinsos KBPP (Sumber data: BPS)

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Menurunnya resiko bencana	Indeks Resiko Bencana Indonesia	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	<p>Nilai Indeks Ketahanan Daerah yang diperoleh</p> <p>Nilai Indeks Ketahanan Daerah yang diperoleh</p>	BPPD
4.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan dan optimalisasi sektor usaha potensial di Kabupaten Pemalang	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	$\frac{PDB \text{ pada tahun } n - PDB \text{ pada tahun } (n-1)}{PDB \text{ pada tahun } (n-1)} \times 100\%$	Bappeda (Sumber data: BPS)
				PDRB Per Kapita	Rp	$\frac{PDRB}{\text{Jumlah Penduduk pertengahan tahun}}$	Bappeda (Sumber data: BPS)
				Laju Inflasi	%	<p>Dimana :</p> <p><math>\Delta Inf</math> = perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya</p> <p><math>t</math> = adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi.</p> <p>Sedangkan <math>\Delta Inf</math> dihitung dengan rumus sebagai berikut :</p> $\Delta Inf = \frac{Inf_{(n+1)} - Inf_{(n)}}{Inf_{(n)}} \times 100\%$ <p>Dimana :</p> <p><math>Inf_n</math> = nilai inflasi pada tahun n</p> <p><math>Inf_{(n+1)}</math> = nilai pada 1 tahun berikutnya</p> <p>n = tahun ...</p>	Bappeda (Sumber data: BPS)
	Menurunnya tingkat pengangguran		Tingkat Pengeluaran Perkapita	Rp	<p>Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/ril dengan tahun dasar</p> $\frac{\text{Jumlah Pengeluaran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	Disanaker (Sumber data: BPS)	

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB
1							
5.	Menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Pemalang	Angka kemiskinan	4	5	6	7	8
			Menurunnya penduduk miskin	Angka kemiskinan	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk miskin}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	
			Meningkatnya penanganan pemberian jaminan sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	%	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100\%$	Dinsos KBPP

BUPATI PEMALANG,

cap  
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG,



SRI SUBYAKTO, SH., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI PEMALANG  
 NOMOR 30 TAHUN 2020  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016-2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
 TAHUN 2016 – 2021**

**A. SEKRETARIAT DAERAH**

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1.	Meningkatnya perkembangan perekonomian, usaha daerah dan sektor informal yang lebih produktif dan kompetitif melalui kerjasama dan iklim investasi yang baik	Akumulasi laba perusaha per tahun (Milyar Rupiah)	Rp	Akumulasi laba perusaha per tahun (Milyar Rupiah)	BAGIAN PEREKONOMIAN & SDA
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai LPPD	Nilai	Nilai LPPD yang diperoleh	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai evaluasi AKIP Serda	Nilai	Nilai evaluasi AKIP Serda yang diperoleh	SEMUA BAGIAN PADA SETDA
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai evaluasi AKIP Pemda komponen pelaporan kinerja	Nilai	Nilai evaluasi AKIP Pemda komponen pelaporan kinerja yang diperoleh	BAGIAN ORGANISASI
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-rata Skor Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik	skor	Rata-rata Skor Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik	BAGIAN ORGANISASI
5.	Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah.	Persentase kewenangan daerah yang sesuai tupoksi dibanding dengan seluruh kewenangan	%	Jumlah OPD yang dibentuk dg kewenangan UU No. 23 tahun 2014 dan PP 18 tahun 2016 x 100% Jumlah OPD secara keseluruhan	BAGIAN ORGANISASI

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
6.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kerukunan hidup antar umat beragama.	Persentase kebijakan pemerintah daerah bidang sosial, keagamaan dan penanggulangan kemiskinan yang dimonitor dan dievaluasi	%	$\frac{\text{jumlah kebijakan bidang sosial, keagamaan dan penanggulangan kemiskinan yg dilaksanakan}}{\text{jumlah seluruh kebijakan bidang sosial, keagamaan dan penanggulangan kemiskinan}} \times 100\%$	BAGIAN KESRA
7.	Meningkatnya pengendalian pembangunan daerah	Persentase kegiatan/ paket pekerjaan konstruksi yang dimonitoring dan dievaluasi	%	$\frac{\text{jumlah kegiatan atau paket pekerjaan konstruksi yang dimonitor dan dievaluasi}}{\text{jumlah kegiatan atau paket pekerjaan yang ada}} \times 100\%$	BAGIAN PEMBANGUNAN
8.	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase usulan Raperda yang menjadi Perda	%	$\frac{\text{jumlah usulan Raperda yg ditetapkan menjadi Perda}}{\text{jumlah usulan Raperda yang masuk}} \times 100\%$	BAGIAN HUKUM
9.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Persentase pemenuhan pelayanan KDH/KWDH	%	$\frac{\text{jumlah kegiatan KDH KWDH yang terlayani}}{\text{jumlah seluruh kegiatan KDH KWDH}} \times 100\%$	BAGIAN PROKOMPIM

**B. SEKRETARIAT DPRD**

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Dilaksanakannya pembahasan produk-produk hukum sesuai aspirasi masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Perda yang ditetapkan Raperda yang disetujui DPRD Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	Buah % %	$\frac{\text{Jumlah Perda yang ditetapkan}}{\text{Jumlah Raperda yang disetujui DPRD}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD}}{\text{Jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan}} \times 100\%$	BAGIAN PERSIDANGAN

**C. INSPEKTORAT**

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya sistem pengendalian intern pemerintah.	Implementasi penyelenggaraan SPIp	Level	Level SPIp yang diperoleh	INSPEKTORAT
2.	Meningkatnya level kapabilitas APJP	Level kapabilitas APJP Inspektorat Kabupaten Pemalang	Level	Level kapabilitas APJP Inspektorat Kabupaten Pemalang	INSPEKTORAT

**D. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan daerah	Tingkat keselarasan antara program RKPD dengan RPJMD	%	Jumlah Program dan Kegiatan yang tercantum dalam RKPD X 100% Jumlah Program dan Kegiatan yang tercantum dalam RPJMD	BAPPEDA
		Nilai evaluasi AKIP komponen perencanaan kinerja	Skor	Nilai evaluasi AKIP komponen perencanaan kinerja	BAPPEDA
		Persentase Prioritas Usulan Hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	%	Jumlah Usulan kegiatan prioritas yang terhimpun dalam Musrenbang X 100% Jumlah usulan kegiatan yang tercantum dalam RKPD	BAPPEDA
2.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembangunan di daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penelitian dan pengembangan	%	<i>Dokumen perencanaan pembangunan bidang penelitian pengembangan yang dibutuhkan</i> X 100% <i>Dokumen perencanaan pembangunan bidang penelitian pengembangan yang ada</i>	BAPPEDA
		Persentase kegiatan inovasi daerah yang difasilitasi	Kegiatan	Jumlah Kegiatan Penelitian dan Inovasi yang difasilitasi	BAPPEDA

**E. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	Persentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti diklat	%	$\frac{\text{Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Diklat}}{\text{Jumlah Aparatur Sipil Negara}} \times 100\%$	BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR
2.	Terwujudnya sumber daya aparatur yang profesional melalui penataan atas kebutuhan/kompetensi/sistem karier	Persentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Assessment (uji kompetensi) sebagai bahan pertimbangan tim baperjakat	%	$\frac{\text{Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti assesment}}{\text{Jumlah Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat jabatan}} \times 100\%$	BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR BIDANG JABATAN DAN PENILAIAN KINERJA
		Persentase ASN yang dilakukan penataan	%	$\frac{\text{Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mutasi}}{\text{Jumlah Aparatur Sipil Negara}} \times 100\%$	BIDANG MUTASI DAN PEMBINAAN
3.	Terwujudnya layanan kepegawaian yang dapat cepat, tepat, berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan dukungan database PNS yang akurat yang dapat dipakai sebagai bahan	Persentase pembangunan/pengembangan informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi	%	$\frac{\text{Jumlah aplikasi yang dibangun atau dikembangkan pada tahun n}}{\text{Jumlah aplikasi yang dibangun atau dikembangkan selama periode RPJMD}} \times 100\%$	BIDANG JABATAN DAN PENILAIAN KINERJA

**F. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA**

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1.	Meningkatnya desa tertib administrasi dan pemberdayaan masyarakat desa	Persentase desa tertib administrasi pemerintahan desa	%	$\frac{\text{Jumlah desa tertib administrasi desa}}{\text{Jumlah seluruh Desa}} \times 100\%$	Bidang Pemerintahan Desa
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terbina	%	$\frac{\text{Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang terbina}}{\text{Jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan desa}} \times 100\%$	Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerjasama Desa dan Kelembagaan
		Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang terbina	%	$\frac{\text{Jumlah lembaga ekonomi desa yang terbina}}{\text{Jumlah seluruh lembaga ekonomi desa aktif}} \times 100\%$	Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerjasama Desa dan Kelembagaan

**G. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Angka partisipasi masyarakat yang bersekolah di jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar yang termasuk di dalamnya pendidikan kesetaraan	Harapan Lama Sekolah (HLS), (BPS)	Tahun	$HLS_t^t = FK \times \sum_{l=d}^n \frac{E_l^t}{P_l^t}$	DINDIKBUD (Sumber data: BPS)
		Rata-rata Lama Sekolah (BPS)	Tahun	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan	DINDIKBUD (Sumber data: BPS)
		Angka Kelulusan SD/MI	%	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$	BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN
		Angka Kelulusan SMP/Mts	%	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/Mts}}{\text{Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi pada jenjang SMP/Mts pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$	BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR BIDANG PEMBINAAN PAUD & DIKMAS
		Angka Melanjutkan SD/MI	%	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD atau MI Tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	BIDANG SARANA & PRASARANA
		Angka Melanjutkan SMP/MTs	%	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada SMP/SMK/MA}}{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs Tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	BIDANG KEBUDAYAAN
2.	Meningkatnya Kelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Pemalang	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang di lestarikan	%	$\frac{\text{Jumlah kelompok seni yang aktif}}{\text{Total jumlah kelompok seni}} \times 100\%$	
3.	Meningkatnya Jumlah Kelompok seni yang aktif	Cakupan kelompok seni yang aktif	%	$\frac{\text{Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Total jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya}} \times 100\%$	

**H. DINAS KESEHATAN**

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	tahun	$\text{Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur}$	DINAS KESEHATAN (Sumber data: BPS)

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1.	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	$\frac{\text{Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan, dan paska persalinan}}{\text{Jumlah kelahiran hidup dalam waktu yang sama}} \times 100.000$	DINAS KESEHATAN
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan anak dan balita	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	$\frac{\text{Jumlah kematian bayi (berumur kurang dari usia 1 tahun)}}{\text{Jumlah kelahiran hidup dalam waktu yang sama}} \times 1.000$	DINAS KESEHATAN
		Angka Kematian Balita (AKABA)	Per 1.000 KH	$\frac{\text{Jumlah kematian anak (berumur kurang dari 5 tahun)}}{\text{Jumlah kelahiran hidup dalam waktu yang sama}} \times 1.000$	DINAS KESEHATAN
4.	Meningkatnya gizi keluarga dan masyarakat	Persentase Balita Gizi Buruk	%	$\frac{\text{Jumlah Balita gizi Buruk}}{\text{Jumlah Balita di 1 wilayah pada kurun waktu yang sama}} \times 100 \%$	DINAS KESEHATAN

**1. DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1.	Meningkatnya penanganan pemberian jaminan sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan sosial	%	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan}}{\text{Jumlah PMKS yang menjadi kewenangan}} \times 100$	BIDANG SOSIAL
2.	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan partisipasi perempuan dalam ranah publik	Persentase kelembagaan PUG dan anak yang aktif	%	$\frac{\text{Jumlah kelembagaan PUG yang aktif}}{\text{Jumlah kelembagaan PUG yang ada}} \times 100$	BIDANG SOSIAL
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB	Cakupan peserta KB Aktif	%	$\frac{\text{Jumlah peserta Program KB aktif}}{\text{Jumlah peserta Program KB}} \times 100\%$	DINSOS KB PP

**J. DINAS TENAGA KERJA**

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	Menurunnya tingkat pengangguran	Persentase tingkat pengangguran terbuka	%	$\frac{\text{Jumlah pengangguran terbuka}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100$	DISNAKER (Sumber data: BPS)
2.	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja	%	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja}}{\text{Jumlah pencari kerja yang mendaftar pelatihan kerja}} \times 100$	BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA
3.	Meningkatnya akreditasi dan perijinan lembaga pelatihan kerja	Jumlah LPK milik pemerintah, perusahaan dan milik swasta yang mendapatkan pembinaan	LPK	$\frac{\text{Jumlah LPK milik pemerintah, perusahaan dan milik swasta yang mendapatkan pembinaan}}{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}} \times 100$	BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA, PELATIHAN DAN TRANSMIGRASI
4.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri	Persentase jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	%	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja}} \times 100$	BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA, PELATIHAN DAN TRANSMIGRASI
5.	Meningkatkan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan	%	$\frac{\text{Jumlah pekerja/buruh peserta BPJS}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$	BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
6.	Meningkatnya kuantitas, kualitas Program Transmigrasi	Jumlah (KK) yang ditempatkan	KK	$\frac{\text{Jumlah kasus perselisihan yang terfasilitasi dan terselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh kasus perselisihan}} \times 100\%$	BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA, PELATIHAN DAN TRANSMIGRASI

**K. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya cakupan kepemilikan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.	Persentase penduduk ber-KTP persatuan penduduk	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas yang ber KTP}}{\text{Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah}} \times 100 \%$	DISDUKCATPIL
		Persentase anak berakte kelahiran	%	$\frac{\text{Jumlah anak (usia 0 - 18 tahun) yang memiliki akte kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk (0 - 18)}} \times 100 \%$	
		Persentase kepemilikan akte kelahiran	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk (usia 0 - 18 tahun)}} \times 100 \%$	
		Persentase pasangan berakta nikah	%	$\frac{\text{Jumlah pasangan nikah berakta nikah}}{\text{Jumlah keseluruhan pasangan yang telah menikah}} \times 100 \%$	

**L. DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya peran dan kualitas koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam sehat	%	$\frac{\text{Jumlah KSP - USP sehat di Kab Pemalang tahun } n}{\text{Jumlah KSP - USP sehat yang dinilai tahun } n} \times 100 \%$	BIDANG KOPERASI DAN UMKM
2.	Meningkatnya Pertumbuhan IKM yang berbahan baku lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase Pertumbuhan IKM	%	$\frac{\text{Jumlah IKM tahun } n - \text{Jumlah IKM tahun } n - 1}{\text{Jumlah IKM tahun } n - 1} \times 100 \%$	BIDANG INDUSTRI
3.	Meningkatnya peran usaha sektor perdagangan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase pertumbuhan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	$\frac{\text{Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan tahun } n - \text{Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan tahun } n - 1}{\text{Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan tahun } n - 1} \times 100 \%$	BIDANG PERDAGANGAN
4.	Meningkatnya kualitas pasar daerah melalui pembangunan, rehabilitasi dan revitalisasi pasar.	Prosentase Pasar Rakyat yang Memenuhi Kriteria Pasar Sehat	%	$\frac{\text{Jumlah pasar sehat tahun } n}{\text{Jumlah seluruh pasar daerah}} \times 100 \%$	BIDANG PASAR

**M. DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kunjungan wisata ke Kabupaten Pemalang	Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n - 1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - 1} \times 100 \%$	DISPARPORA
2.	Meningkatnya organisasi kepemudaan yang aktif	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	Kelompok/ Organisasi	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	BIDANG PEMUDA & OLAHRAGA
3.	Meningkatnya prestasi cabang olahraga	Jumlah cabang olahraga berprestasi	Cabang olahraga	Jumlah prestasi cabang olahraga yang diraih	BIDANG PEMUDA & OLAHRAGA

**N. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang secara merata	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	$\frac{\text{Jalan dalam kondisi baik}}{\text{Panjang jalan secara keseluruhan}} \times 100 \%$	BIDANG BINA MARGA
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	$\frac{\text{Jembatan dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah jembatan secara keseluruhan}} \times 100 \%$	BIDANG BINA MARGA
		Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	%	$\frac{\text{Irigasi dalam kondisi baik}}{\text{Panjang irigasi secara keseluruhan}} \times 100 \%$	BIDANG SDAME
		Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	%	$\frac{\text{Panjang drainase dalam kondisi baik (km)}}{\text{Panjang seluruh drainase di wilayah perkotaan}} \times 100 \%$	BIDANG JASA KONSTRUKSI, CIPTA KARYA DAN TARU
		Cakupan rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum	%	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang terlayani}}{\text{Proyeksi total masyarakat}} \times 100 \%$	BIDANG JASA KONSTRUKSI, CIPTA KARYA DAN TARU
2.	Meningkatnya ketaatan terhadap RT/RW	Cakupan pemanfaatan tata ruang wilayah	%	$\frac{\text{Luas lahan yang dimanfaatkan sesuai tata ruang}}{\text{Luas pemanfaatan lahan di Kabupaten Pemalang}} \times 100 \%$	BIDANG JASA KONSTRUKSI, CIPTA KARYA DAN TARU

**O. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI / RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	%	$\frac{\text{Jumlah rumah tidak layak huni tertangani}}{\text{Jumlah rumah tidak layak huni}} \times 100\%$	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
2.	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh	%	$\frac{\text{Total wilayah permukiman kumuh}}{\text{Jumlah total luasan wilayah kumuh yang telah ditetapkan}} \times 100\%$	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

**P. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI / RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya layanan informasi dan aspirasi publik	Persentase layanan pengaduan masyarakat secara daring yang ditindaklanjuti tepat waktu	%	$\frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk}} \times 100\%$	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI
		Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik dari Pemerintah Pusat/Propinsi	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI (Sumber data: Komisi Informasi Jawa Tengah)
		Tingkat Pemenuhan Informasi Publik pada situs web resmi Kabupaten Pemalang dan situs web resmi Organisasi Perangkat Daerah	%	$\frac{\text{Jumlah informasi publik pada website resmi Pemda Pemalang dan website PD}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT
2.	Meningkatnya layanan telekomunikasi dan Informatika.	Tersedianya data Center dengan NOC berstandar	%	$\frac{\text{Jumlah aplikasi yang tersedia}}{\text{Kapasitas server yang tersedia}} \times 100\%$	BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT
		Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE)	Nilai	Nilai/Skor Sistem Pemerintahan Basis Elektronik	BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
		Penemuan sistem manajemen pengamanan Informasi	Nilai	Sertifikasi Pengamanan Informasi	BIDANG POS, TELEKOMUNIKASI & STATISTIK
3.	Ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tersedianya data statistik terintegrasi	%	$\frac{\text{Jumlah data statistik yang terintegrasi}}{\text{Jumlah data statistik}} \times 100\%$	BIDANG POS, TELEKOMUNIKASI & STATISTIK

**Q. DINAS PERHUBUNGAN**

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya ketersediaan sarana transportasi umum bagi masyarakat	Persentase ketersediaan angkutan umum	%	$\frac{\text{Jumlah Angkutan umum}}{\text{Jumlah Penumpang}} \times 100\%$	BIDANG ANGKUTAN
2.	Meningkatnya infrastruktur, sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan	Persentase tersedianya terminal angkutan penumpang yang tersedia di Kabupaten	%	$\frac{\text{Tersedianya pembangunan terminal angkutan penumpang}}{\text{Kebutuhan terminal angkutan penumpang}} \times 100\%$	BIDANG ANGKUTAN
		Persentase Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	%	$\frac{\text{Jumlah rambu} - \text{rambu yang ada}}{\text{Jumlah Rambu} - \text{rambu seharusnya}} \times 100\%$	BIDANG LALU LINTAS

**R. DINAS PERTANIAN**

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan	Produktivitas padi	Kw/Ha	$\frac{\text{Produksi padi}}{\text{Luas areal panen tanaman padi}}$	BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA UTAMA

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
		Produksi komoditas perkebunan utama	Ton	Jumlah produksi tujuh komoditas perkebunan	BIDANG PERKEBUNAN
2.	Meningkatnya produksi hasil peternakan	Produksi peternakan	Kg	Jumlah produksi daging 7 komoditas dan telur 3 komoditas peternakan	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.	Meningkatnya ketersediaan cadangan pangan daerah	Cadangan pangan pemerintah	Ton	Jumlah cadangan pangan yang tersedia	BIDANG KETAHANAN PANGAN
4.	Meningkatnya sistem penanganan keamanan pangan segar	Pola pangan Harapan	Skor	$\% AKG = \frac{\text{Energi masing - masing komoditas}}{\text{Angka Kecukupan Gizi}} \times 100\%$	

**S. DINAS PERIKANAN**

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan dan optimalisasi sektor usaha potensial untuk kesejahteraan pelaku perikanan	Produksi perikanan budidaya Produksi perikanan tangkap Angka Konsumsi Ikan	Kg Kg Kg/Kapita/Tahun	Produksi perikanan budidaya menunjukkan jumlah produksi budidaya perikanan Produksi perikanan tangkap menunjukkan jumlah produksi perikanan tangkap Hasil penjumlahan dari konsumsi ikan rumah tangga (SUSENAS), konsumsi ikan di luar rumah tangga (hotel, rumah sakit, catering), dan konsumsi ikan yang tidak tercatat	BIDANG PENGELOLAAN BUDIDAYA PERIKANAN BIDANG PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN BIDANG BINA USAHA

**T. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya nilai realisasi investasi	Jumlah nilai investasi beskala nasional (PMDN/PMA)	Rp	Jumlah Realisasi Investasi	DPMPTSP
2.	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	DPMPTSP
		Persentase pengaduan pelayanan perijinan dan investasi yang ditindaklanjuti/ditangani	%	Jumlah pengaduan pelayanan perijinan dan investasi yang ditindaklanjuti/ditangani $\frac{\text{Jumlah pengaduan pelayanan perijinan dan investasi}}{\text{Jumlah pengaduan pelayanan perijinan dan investasi}} \times 100\%$	DPMPTSP

**U. DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air	Nilai	Jumlah UKL – UPL yang dilayani $\frac{\text{Jumlah usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen atau izin lingkungan}}{\text{Jumlah UKL – UPL yang dilayani}} \times 100\%$	DLH
		Indeks kualitas udara	Nilai	Volume sampah yang ditangani $\frac{\text{Volume sampah yang ditangani}}{\text{Volume timbunan sampah}} \times 100\%$	DLH
		Indeks kualitas tutupan lahan	Nilai	Jumlah usaha yang mentaati persyaratan administrasi dan teknik pencegahan pencemaran air $\frac{\text{Jumlah usaha yang wajib mentaati persyaratan administrasi teknik pencegahan pencemaran air}}{\text{Jumlah usaha yang wajib mentaati persyaratan administrasi teknik pencegahan pencemaran air}} \times 100\%$	DLH
		Nilai Adipura	Nilai	Nilai Adipura yang diperoleh	DLH

V. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah	Unit	Jumlah perpustakaan yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat, yang meliputi: - Perpustakaan Umum - Perpustakaan Kecamatan - Perpustakaan Desa/Kelurahan - Perpustakaan Masyarakat (TBM-Taman Baca Masyarakat) - Perpustakaan Keliling	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	Meningkatnya budaya gemar baca masyarakat	Angka kunjungan perpustakaan per tahun	%	Jumlah Pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam 1 (satu) tahun $\frac{\text{Jumlah penduduk usia 5 - 59 tahun}}{\text{Jumlah pengunjung perpustakaan dihitung berdasarkan pengisian daftar kehadiran atau berdasarkan data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung}} \times 100\%$	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	Meningkatnya koleksi perpustakaan	Tingkat Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Judul Exemplar	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah $\frac{\text{Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah}}{\text{Jumlah OPD yang telah menerapkan arsip secara baku}} \times 100\%$	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
4.	Terwujudnya penyelamatan, pengolahan, perlindungan dan pelestarian serta akses arsip untuk kepentingan pemerintah dan pelayanan publik	Persentase arsip yang dilahmedikan Persentase arsip yang dinusnahkan	% %	$\frac{\text{Perbandingan jumlah Desa/Kelurahan yang telah menerapkan arsip secara baku}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}} \times 100\%$	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

**W. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD	Nilai	Ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD	BIDANG ANGGARAN
		Persentase ketepatan waktu penyampaian LKD ke BPK	%	Ketepatan waktu penyampaian LKD ke BKD	BIDANG AKUNTANSI DAN ASET DAERAH
		Persentase ketepatan waktu penyampaian Raperda pertanggungjawaban APBD	%	Ketepatan waktu penyampaian Raperda pertanggungjawaban APBD	BIDANG ANGGARAN
		Persentase SP2D yang diterbitkan tepat waktu	%	Ketepatan waktu penerbitan SP2D	BIDANG PERBENDAHARAAN
		Persentase pemanfaatan aset daerah	%	Pemanfaatan aset daerah	BIDANG AKUNTANSI DAN ASET DAERAH

**X. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisien dalam pemanfaatan APBD	Rasio realisasi PAD terhadap potensi / target PAD	%	$\frac{\text{Jumlah realisasi PAD tahun } n}{\text{Target PAD tahun } n} \times 100\%$	BAPEMDA
		Peningkatan pertumbuhan PAD	%	$\frac{\text{Jumlah realisasi PAD tahun } n - \text{realisasi PAD thn } n - 1}{\text{PAD tahun } n - 1} \times 100\%$	BAPEMDA

Y. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas pelaku penanggulangan bencana	Jumlah Desa Tangguh	Desa	Jumlah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan	BIDANG Pencegahan DAN Kesiapsiagaan
2.	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyusunan rencana penanggulangan bencana beserta pemantauan dan money yang dilakukan	Persentase desa dalam kawasan rawan bencana yang terpetakan potensi/resiko bendananya	%	Jumlah Desa dalam kawasan rawan bencana yang terpetakan potensi resiko bendananya $\frac{\text{Jumlah desa dalam kawasan rawan bencana}}{\text{Jumlah desa dalam kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	BIDANG Pencegahan DAN Kesiapsiagaan
3.	Meningkatnya pengerahan peralatan, pemberian bantuan dan logistik dalam rangka penanganan darurat bencana yang efektif dan efisien	Persentase korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap yang dilaporkan	%	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap yang dilaporkan $\frac{\text{Jumlah korban bencana yang dilaporkan}}{\text{Jumlah korban bencana yang dilaporkan}} \times 100\%$	BIDANG Kedaruratan DAN Logistik
4.	Meningkatnya penanganan darurat bagi korban bencana untuk kebutuhan dasar dan bantuan sosial yang diperlukan	Persentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat yang dilaporkan	%	Jumlah korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat yang dilaporkan $\frac{\text{Jumlah korban bencana yang dilaporkan}}{\text{Jumlah korban bencana yang dilaporkan}} \times 100\%$	BIDANG Kedaruratan DAN Logistik
5.	Meningkatnya perlindungan dan pemulihan akibat dampak bencana, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi yang diperlukan	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana Alam Lingkup Kabupaten	%	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Lingkup Kewenangan Kabupaten $\frac{\text{Seluruh Wilayah Pasca Bencana Alam}}{\text{Seluruh Wilayah Pasca Bencana Alam}} \times 100\%$	BIDANG Rehabilitasi DAN Rekonstruksi
6.	Meningkatnya kapasitas pelaku penanggulangan bencana dalam tindakan hitung cepat (rapid assesment) pasca bencana	Persentase Peserta Pelatihan Penghitungan Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana Alam Lingkup Kabupaten yang berkompeten	%	Peserta Pelatihan Penghitungan Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana Alam Lingkup Kabupaten yang berkompeten $\frac{\text{Seluruh Peserta Pelatihan Penghitungan Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana Alam Lingkup Kabupaten}}{\text{Seluruh Peserta Pelatihan Penghitungan Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana Alam Lingkup Kabupaten}} \times 100\%$	BIDANG Rehabilitasi DAN Rekonstruksi

**Z. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1.	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban dan kondusifitas daerah untuk menunjang investasi daerah	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota	%	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang diselesaikan di tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang dilaporkan dan/atau dipantau di tahun bersangkutan}} \times 100\%$	BIDANG PENECAKAN PERUNDANG-UNDANGAN
		Persentase patroli siaga dan ketertiban masyarakat	%	$\frac{\text{Banyaknya kelompok patroli x3 kali patroli dalam sehari}}{\text{Banyaknya kelompok kecamatan (jumlah wilayah kecamatan) dalam wilayah kab/kota}} \times 100\%$	BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
		Jumlah patroli petugas Satpol PP	patroli	Cakupan patroli petugas Satpol PP	
		Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Per 10.000	$\frac{\text{Jumlah polisi pamong praja} \times 10.000}{\text{Jumlah penduduk}}$	BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
		Rasio LINMAS per jumlah 10.000 penduduk	rasio	$\frac{\text{Jumlah satuan linmas dalam satu Kabupaten/kota}}{\text{jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu Kabupaten/kota}}$	BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
		Jumlah kasus konflik sosial	kasus	Jumlah kasus konflik sosial yang terjadi di masyarakat	
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten/Kota	%	$\frac{\text{Jumlah luas W/MK Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah luas potensi ancaman kebakaran Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	UPT PEMADAM KEBAKARAN
		Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> )	%	$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran W/MK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan W/MK}} \times 100\%$	UPT PEMADAM KEBAKARAN
		Persentase aparaturnya yang memenuhi standar kualifikasi	%	$\frac{\text{Jumlah satgas Damkar yg memiliki sertifikasi sesuai dlm tingkat waktu tanggap}}{\text{Jumlah satgas Damkar}} \times 100\%$	UPT PEMADAM KEBAKARAN
		Cakupan mobil pemadam kebakaran diatas 3000 – 5000 liter pada W/MK	%	$\frac{\text{Jumlah W/MK memiliki mobil dan atau mesin damkar yg laik pakai waktu tanggap}}{\text{Jumlah W/MK atau lingkungan dan atau kawasan berpotensi kebakaran}} \times 100\%$	UPT PEMADAM KEBAKARAN

**AA. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN RENSTRA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)</b>
1	2	3	4	5	6
1.	Terciptanya ketertiban dan keamanan lingkungan masyarakat	Cakupan Penanganan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan	%	$\frac{\text{Jumlah penanganan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan}}{\text{Jumlah seluruh gangguan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan yang dilaporkan}} \times 100\%$	BIDANG KESATUAN BANGSA
2.	Terciptanya kehidupan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keyakinan dan keragaman etnis	Cakupan pembinaan terhadap kerukunan umat beragama dan keragaman etnis	%	$\frac{\text{Jumlah Penanganan konflik rumah ibadah (IMB), SARA}}{\text{Jumlah konflik rumah ibadah (IMB), SARA}} \times 100\%$	BIDANG POLITIK DALAM NEGERI & ORGANISASI KEMASYARAKATAN
3.	Terwujudnya masyarakat yang berjiwa nasionalisme tinggi	Cakupan penanaman nilai luhur dan budaya bangsa kepada masyarakat melalui kegiatan peringatan hari besar nasional dan nilai-nilai perjuangan daerah	%	$\frac{\text{Jumlah hari - hari besar nasional dan nilai perjuangan daerah}}{\text{Jumlah pelaksanaan peringatan hari - hari besar nasional dan nilai - nilai perjuangan daerah}} \times 100\%$	BIDANG KESATUAN BANGSA
4.	Terciptanya masyarakat yang demokratis dan dinamis	Cakupan pembinaan politik terhadap LSM, Ormas dan OKP	%	$\frac{\text{Jumlah ormas, LSM, OKP yg mendapatkan pembinaan politik}}{\text{Jumlah ormas, LSM, OKP terdaftar}} \times 100\%$	BIDANG POLITIK DALAM NEGERI & ORGANISASI KEMASYARAKATAN

**BB. KECAMATAN**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN RENSTRA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)</b>
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai evaluasi AKIP Kecamatan	Skor	$\frac{\text{Nilai evaluasi AKIP yang diperoleh}}{\text{Jumlah lembaga dan tokoh masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang kelurahan}} \times 100\%$	KECAMATAN YANG ADA KELURAHAN
2.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan	Persentase kelengkapan administrasi desa binaan	%	$\frac{\text{Jumlah desa yang lengkap administrasi}}{\text{Jumlah desa binaan}} \times 100\%$	KECAMATAN

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai evaluasi AKIP Kecamatan Persentase dan partisipasi masyarakat dalam musrenbang kelurahan	Skor %	Nilai evaluasi AKIP yang diperoleh Jumlah lembaga dan tokoh masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang kelurahan Jumlah lembaga dan tokoh masyarakat yang ada dalam kelurahan $\times 100\%$	KECAMATAN KECAMATAN YANG ADA KELURAHAN
2.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan	Persentase kelengkapan administrasi desa binaan	%	$\frac{\text{Jumlah desa yang lengkap administrasi}}{\text{Jumlah desa binaan}} \times 100\%$	KECAMATAN
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase meningkatnya kualitas pelayanan publik Nilai SKM Persentase penanganan pengaduan masyarakat Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang difasilitasi dengan baik dan layak	% Skor %	Skor Nilai SKM $\frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani}}{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang disampaikan}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang difasilitasi dengan baik dan layak}}{\text{Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seluruhnya}} \times 100\%$	KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN YANG MEMILIKI KELURAHAN

BUPATI PEMALANG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

JUNAEI

  
SRI SUBYAKTO, SH., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650218 199203 1 006

cap  
tttd